

SKRIPSI

**PENGUJIAN HUKUM WAGNER DAN HYPOTESIS KEYNES:
ANALISIS KAUSALITAS PENGELUARAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI
SULAWESI SELATAN**

MUH. FACHRUL

A011201048



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGUJIAN HUKUM WAGNER DAN HYPOTESIS KEYNES: ANALISIS KAUSALITAS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. FACHRUL

A011201048



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

PENGUJIAN HUKUM WAGNER DAN HYPOTESIS KEYNES: ANALISIS KAUSALITAS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

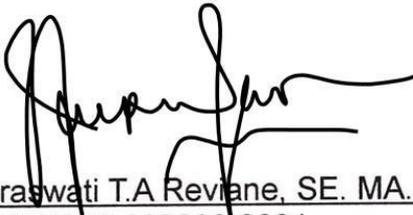
MUH. FACHRUL

A011201050

Telah dipertahanan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 23 Juli 2024

Pembimbing I



Dr. Indraswati T.A Reviane, SE. MA., CWM
NIP. 19651012 199903 2001

Pembimbing II



Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM
NIP. 19770119 200801 2008

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM.

NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

PENGUJIAN HUKUM WAGNER DAN HYPOTESIS KEYNES : ANALISIS KAUSALITAS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI SULAWESI SELATAN

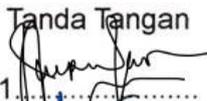
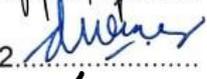
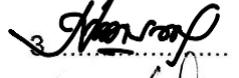
disusun dan diajukan oleh

MUH. FACRHUL

A011201048

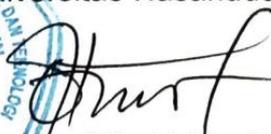
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal, 23 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Indraswati T.A Reviane ,SE.,MA.,CWM	Ketua	1. 
2.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi,SE,M.Si.,CWM	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu., MA., CRP	Anggota	3. 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE.,M.Si.,CSF.,CWM	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM.
NIP . 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Muh. Fachrul**
Nomor Pokok : A011201038
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jenjang : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pengujian Hukum Wagner Dan Hypotesis Keynes : Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Sulawesi Selatan** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Muh. Fachrul

A011201048

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warohmatullai Wabarokatuuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengujian Hukum Wagner Dan Hypotesis Keynes: Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Sulawesi Selatan ”**. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi dari program studi Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak keterbatasan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Skripsi ini tidak akan berhasil diselesaikan tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang turut membantu. Karenanya, penulis ingin mengungkapkan penghargaan dan terima kasih yang besar kepada :

1. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia – Nya , penulis penulis diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ambo Tuwo S.E., M.Si dan Hasniati Tamir, penulis sangat berterimakasih atas didikan, motivasi, semangat, kepercayaan, serta doa yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan waktu yang baik. Terima kasih telah menjadi orang tua yang berhasil membawa penulis hingga seperti saat ini.
3. Untuk adik adik saya tercinta, Putri Nur Rezky dan Muh. Rafly, terima kasih telah menjadi kebanggaan serta salah satu motivasi bagi penulis dalam mengejar impian.

4. Ibu Dr. Insraswati T.A Reviane, SE. MA., CWM® dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM® Terimakasih atas banyaknya saran dan masukan bagi penulis dalam mewujudkan skripsi ini, penulis berdoa agar sekiranya ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah SWT.
5. Bapak Prof.Dr. Abd. Hamid Paddu., M.A dan bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si Sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan kritik yang konstruktif selama proses ujian seminar proposal dan seminar hasil, masukan dan kritik tersebut telah menjadi pengetahuan baru bagi penulis.
6. Kepada Seluruh dosen Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS yang telah berbagi pengetahuan, memberikan nasihat, dan membimbing saya selama masa studi. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada mereka agar dapat terus berdedikasi dalam mengajar dan menyampaikan ilmu kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS.
7. Sahabat penulis yang telah banyak membantu saya dari awal masuk dunia perkuliahan sampai saat ini, Franis, Putri Rajab, Putri Sabrina, Nur Aprilia Nur, Fachira, Challista, Reyhan, Taslim, Ashernov, Rifal, Rizka, Yohan, Egy, Ahlul, Rezky, Otniel dan Shadiq Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan motivasinya serta apapun bantuan yang membuat penulis bangga memiliki sahabat seperti kalian.
8. Terkhusus Kepada Rosmila S.E yang telah menjadi pasangan dan support system penulis selama menjalani masa perkuliahan, terima kasih untuk selalu ada.

9. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2020 (RIVENDELL) yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat hingga penulis bisa berada pada titik ini. Terimakasih telah membersamai penulis bisa berproses sebagai mahasiswa di FEB_UNHAS.
10. Teman-teman UKM Pencak Silat UNHAS dari tiga perguruan terkhusus Kak Erik, Kak Adri, Kak Kak Suci, Kak Alif, Kak Ananda, Kak Ace, Kak Fitri, Fattah, Karmila, Risky, Syadiah, Halbi, Qalbi, Ana, Dana, Alif, Ananda, dan Hera terima kasih atas pengalaman ilmu nya selama penulis berada di dalam organisasi.
11. Kakak Tingkat kultural di Kampus terkhusus Kak Joiy, Kak Harold, Kak Ardi, Kak Mario, Kak Alif, Kak Kurca, Kak Ainul Kak Yola, dan kak aqil Terima kasih atas tips dan saran seputar perkuliahan yang diberikan dalam menghadapi kehidupan kampus.
12. Teman-teman prosesi DIULTI terkhususnya Thio, Tullah, Pian, Alfat, Dadang, Yuyu, Rini, Octa, Rahma dan sasa, terima kasih telah membantu penulis dimasa Pengaderan Awal hingga Pengukuhan Sebagai Keluarga Mahasiswa FEB – UH.
13. Kelompok 17 (Seventeen) PATS 2022, Alfat, Ahmad Dani, Zulhadist, Giray, Auril, Gilang, Marsya, Khusnul, Fifi, Delun, Zahra, Cahya, dan Agnes. Terima kasih telah menjadi salah satu tim yang kompak di prosesi RESISTOR 22
14. Teman-teman kabinet Membara dan terkhususnya departemen Sumber Daya Manusia, Kak Jeksen, Suntan, April, Ratna, Arya, Fadli dan Firda. Terimakasih telah menjadi patner yang baik selama masa kepengurusan saya di HIMAJIE.
15. Sobat “Kampong Tengah”, Terkhusus Muhaemin, Ridwan, Jusniar,

Saeful, Akbar, Abhil, Malik, Atira, Halfiah, dan Alif. Terima Kasih atas kebersamaannya menjadikan “Kampong Tengah” sebagai tempat berkumpulnya Mahasiswa Makassar dari Kec. Sinjai Tengah

16. Teman Teman Kejayaan Mahasiswa Nusantara(KEMANUSA), terkhusus nya Cabang Makassar dan FEB UH, Terima kasih telah menjadi wadah bagi saya mendapat perspektif dan mindset baru dalam memaknai Ilmu Pengetahuan.
17. Teman Teman Lapak Baca “NOMENA” FEB UH, Terkhusus kak Nyanya, Kak Zalel, Kak Amel, Kak windi, dan kak Suja terima kasih telah menjadi wadah diskusi dan bertukar ilmu baru.
18. Teman-teman KKN UH 110 UMKM Kab. Bantaeng terkhusus Posko 14, Arul, Ceca, Fran, Ditha, Nisa, Muti, Kiki Terimakasih atas kebersamaannya selama 45 hari menjalani kegiatan KKN.
19. Staff Departemen Ilmu Ekonomi, Pak Oscar dan Ibu Dama, terima kasih banyak telah membantu saya selama saya mengurus berkas-berkas di departemen.

Makassar, 10 Mei 2024



Muh. Fachrul

ABSTRAK

PENGUJIAN HUKUM WAGNER DAN HYPOTESIS KEYNES : ANALISIS KAUSALITAS PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI SULAWESI SELATAN

Muh. Fachrul
Indraswati T.A Reviane
Nur Dwiana Sari Saudi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan dua pandangan utama yaitu, Hukum Wagner dan Hipotesis Keynes. Hukum Wagner menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah adalah konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, sementara Hipotesis Keynes berargumen bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi. Adapun, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) dan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian berdasarkan FEM menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan begitupula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh negatif terhadap pengeluaran pemerintah. Namun, uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, baik searah maupun sebaliknya. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dalam kebijakan publik harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan jenis pengeluaran tertentu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Hipotesis Keynes, Teori Wagner.

ABSTRACT

TESTING WAGNER'S LAW AND KEYNES HYPOTHESIS: CAUSALITY ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN SOUTH SULAWESI.

Muh. Fachrul
Indraswati T.A Reviane
Nur Dwiana Sari Saudi

This study aims to analyze the causal relationship between government spending and regional economic growth in South Sulawesi, taking into account two main views namely, Wagner's Law and Keynes Hypothesis. Wagner's Law states that increased government spending is a consequence of economic growth, while the Keynes Hypothesis argues that government spending can stimulate economic activity. The analysis method used in this study is panel data regression with Fixed Effect Model (FEM) and Granger causality test. The results of research based on FEM show that government spending has a negative effect on economic growth, and vice versa, economic growth also has a negative effect on government spending. However, the Granger causality test shows that there is no causal influence between government spending and economic growth, either in the same direction or vice versa. Thus, government spending in public policy should be done carefully, considering certain types of spending to achieve optimal economic growth.

Keywords: Government Spending, Economic Growth, Keynes Hypothesis, Wagner Theory.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teoritis	12
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	12
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.3 Hukum Wagner	17
2.1.4 Hipotesis Keynes	18
2.2 Hubungan Antar Variabel	19
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi	19
2.3 Penelitian Terdahulu	20
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	23
2.5 Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	25

3.2	Jenis dan Sumber Data	25
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4	Model Analisis Data	26
3.5	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	31
	BAB IV PEMBAHASAN	33
4.1	Ruang Lingkup Penelitian	33
4.2	Hasil Analisis Data	33
4.2.1	Perkembangan Umum Variabel Penelitian.....	33
4.2.2	Common Effect Model (CEM).....	35
4.2.3	Fixed Effect Model (FEM)	36
4.2.4	Random Effect Model (REM).....	37
1.3	Pemilihan Metode Regresi Data Panel	38
1.3.1	Uji Cow	38
1.3.2	Uji Hausman	39
1.3.3	Uji Stasioner Data Panel	40
1.3.4	Uji Kointegrasi	40
1.3.5	Uji Kausalitas Granger	41
1.4	Uji Hipotesis.....	42
1.5	Hasil dan Pembahasan	45
	BAB V PENUTUP	51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	53
	LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif variabel.....	34
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Panel dengan Common Effect Pengeluaran Pemerintah Terhadap PertumbuhanEkonomi.....	36
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Panel dengan Common Effect Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengeluaran Pemerintah.....	35
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Panel dengan Fixed Effect Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	36
Tabel 4. 5 Hasil Regresi Panel dengan Fixed Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Pemerintah	36
Tabel 4. 6 Hasil Regresi Panel dengan Random Effect Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	37
Tabel 4. 7 Hasil Regresi Panel dengan Random Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Pemerintah	38
Tabel 4. 8 Hasil Uji Chow	38
Tabel 4. 9 Hasil Uji Hausman.....	39
Tabel 4. 10 Uji Stasioner Data Panel	40
Tabel 4. 11 Uji Kointegrasi	40
Tabel 4. 12 Uji Kausalitas Granger	41
Tabel 4. 13 hasil estimasi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi	42
Tabel 4. 14 hasil estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2023.....	7
Gambar 1.2 Grafik Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2023 (dalam Triliun Rupiah).....	8
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Mentah	56
Lampiran 2. Hasil Logaritma Natural	64
Lampiran 3. Hasil Estimasi.....	72
Lampiran 4. Biodata Penulis.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu topik yang banyak dibahas dalam bidang Ekonomi Publik adalah mengenai ukuran dan peran pemerintah dalam perekonomian. Berdasarkan bukti empiris, diketahui bahwa ukuran dan peran pemerintah cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, seperti Pertumbuhan Pendapatan Perkapita. Hal ini terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang.

Perbedaan pendapat mengenai sejauh mana intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian telah ada sejak zaman Mazhab Klasik bahwa pemerintah tidak perlu terlalu campur tangan dalam perekonomian, namun mengakui adanya tiga fungsi dasar pemerintah, yaitu menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan memproduksi barang dan jasa publik.

Hubungan antara ukuran pemerintah dengan perkembangan ekonomi perlu diteliti karena hasil penelitian terkait kedua pandangan tersebut belum konklusif. Pandangan pertama dikenal sebagai hukum atau hipotesis Wagner, yang juga dikenal sebagai law of increasing (extension) state activities (Bojanic, 2013; Chang, 2002; Shams dan Murad, 2009).

Selanjutnya, sebuah hukum yang dikenal sebagai "*the increasing of state activity*" atau Hukum Wagner yang didasarkan pada pengamatan empiris di negara-negara Eropa yang menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat, dimana ukuran aktivitas ini diukur berdasarkan pendapatan per kapita masyarakat, yang diikuti oleh peningkatan

pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat (Yunus & Anwar, 2021).

Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Biasanya, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atau pendapatan atau output per kapita. PDB mencakup nilai total pasar barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan GDP/GNP tanpa memperhatikan apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya, tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di suatu wilayah akan berdampak pada peningkatan pengeluaran pemerintah di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena ada dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Sejak diperkenalkannya hipotesis ini, terjadi perdebatan yang luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ukuran dan peran pemerintah dalam perekonomian.

Teori-teori yang berkembang mengenai hubungan antara kedua variabel ini terbagi menjadi dua pandangan konvensional. Dalam hal ini, Keynes dan Wagner memiliki pandangan yang berbeda terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (Pasaribu & Septriani, 2020). Dimana, pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan tuntutan masyarakat. Sedangkan, disisi lain pengeluaran publik harus meningkat ketika perekonomian mengalami resesi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Wagner melihat pengeluaran pemerintah sebagai variabel endogen dalam perkembangan ekonomi, sementara Keynes memandang pengeluaran pemerintah sebagai variabel eksogen dalam perkembangan ekonomi (Olomola, 2004). Sehingga hubungan kausalitas menurut Keynes bersifat pengeluaran pemerintah menyebabkan perkembangan ekonomi.

Ekonom yang setuju dengan pendapat Wagner berargumen bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah yang tinggi bermasalah dalam hal penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran, apakah dengan meningkatkan pajak, menambah utang, atau mencetak uang. Masing-masing alternatif tersebut mempunyai potensi permasalahan. Mengenakan pajak bisa mendistorsi perekonomian, menambah utang dapat mendesak keluar (crowding out) investasi swasta, dan mencetak uang berlebihan dapat menyebabkan inflasi (Dada, 2017)

Pengeluaran publik memiliki peran penting sebagai faktor eksternal dan alat kebijakan fiskal yang memengaruhi pendapatan nasional. Dalam konteks ini, perubahan dalam pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan perubahan dalam pendapatan, yang berarti bahwa hubungan kausalitas berjalan dari pengeluaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi nasional tanpa adanya mekanisme umpan balik.

Sejak pernyataan Hukum Wagner diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1950 Dimitrios & Richter, telah banyak dilakukan pengujian untuk menguji validitasnya. Sebagian besar studi menggunakan data time series dan melakukan pengujian pada tingkat negara tertentu, terutama di negara-negara maju. Banyak studi telah dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis Hukum Wagner sejak diperkenalkan. Namun, perbedaan temuan studi di berbagai negara telah memunculkan banyak perdebatan dalam ranah teori Keuangan Negara atau

Ekonomi Publik. Beberapa perbedaan pandangan di antara para peneliti tentang kebenaran Hukum Wagner meliputi:

1. spesifikasi bentuk fungsi yang akan diestimasi dan bagaimana hasil estimasi tersebut akan diinterpretasikan. (Abelson 2000 dan Peacock & Scott 2000:6)
2. Pilihan menggunakan data time series atau data cross section dalam analisis regresi, Menurut hasil analisis meta dari Peacock & Scott (2000), terdapat lebih banyak studi yang menggunakan data time series daripada data cross section. Hanya studi yang dilakukan oleh Gandhi (1971) yang menggunakan data cross section dan mencoba untuk membedakan fenomena yang terjadi.
3. Berkembangnya kajian tentang masalah kointegrasi dalam analisis time series (Samudran et al. 2009),
4. Diragukannya apakah hipotesis Hukum Wagner bisa berlaku secara universal (Gandhi et al.1971 Hondroyiannis et al. 1995, dan Dritsaki & Adamopoulos 2009) mengungkapkan bahwa Wagner's law hanya berlaku pada beberapa komponen pengeluaran pemerintah. Temuan mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara rasio pengeluaran untuk pertahanan, belanja barang, pendidikan, dan pertanian terhadap pengeluaran total (G).

Meskipun telah dilakukan banyak studi empiris mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Studi-studi ini dengan menggunakan variasi spesifikasi, periode sampel, dan data dari berbagai negara. Namun, hasil-hasil tersebut belum memberikan jawaban yang pasti mengenai kausalitas antara kedua variabel tersebut.

Selain itu, hasil pengujian antara Hukum Wagner dan Hipotesis Keynes juga beragam dan kontradiktif. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh A. Islam (2001) menemukan bahwa penelitiannya mendukung Hukum Wagner daripada Hipotesis Keynes. Namun, penelitian yang dilakukan oleh John Loizides dan

George Vamvoukas (2005) menunjukkan hasil yang berbeda di negara-negara seperti UK, Irlandia, dan Yunani, di mana ada yang mendukung Hukum Wagner dan ada yang lebih cocok dengan Hipotesis Keynes. Dengan kata lain, beberapa hasil empiris mendukung pandangan Wagner daripada hipotesis Keynesian, sementara hasil lainnya mendukung pandangan Keynesian.

Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan ekonomi terbesar kesembilan di Indonesia. Ekonomi Sulawesi Selatan telah berkembang sejak beberapa dekade, dengan sektor-sektor seperti kelautan-perikanan, pertanian-perkebunan, peternakan, dan energi yang menjadi pendorong utamanya.

Sulawesi Selatan juga berperan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, dengan potensi untuk menjadi pusat ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Perekonomian 2 Selatan mencakup berbagai sektor, termasuk industri, pertambangan, dan jasa.

Provinsi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti sumber daya energi, pertanian, dan perikanan. Ekonomi Sulawesi Selatan juga didukung oleh sektor jasa, terutama di bidang pariwisata, yang semakin berkembang dengan adanya berbagai objek wisata alam dan budaya yang menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Sulawesi Selatan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan pengeluaran pemerintah di suatu daerah secara proporsional berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan hukum Wagner. Keuangan daerah yang mandiri menjadi faktor penting terkait kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah itu sendiri. Besar kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah memberikan peluang yang optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

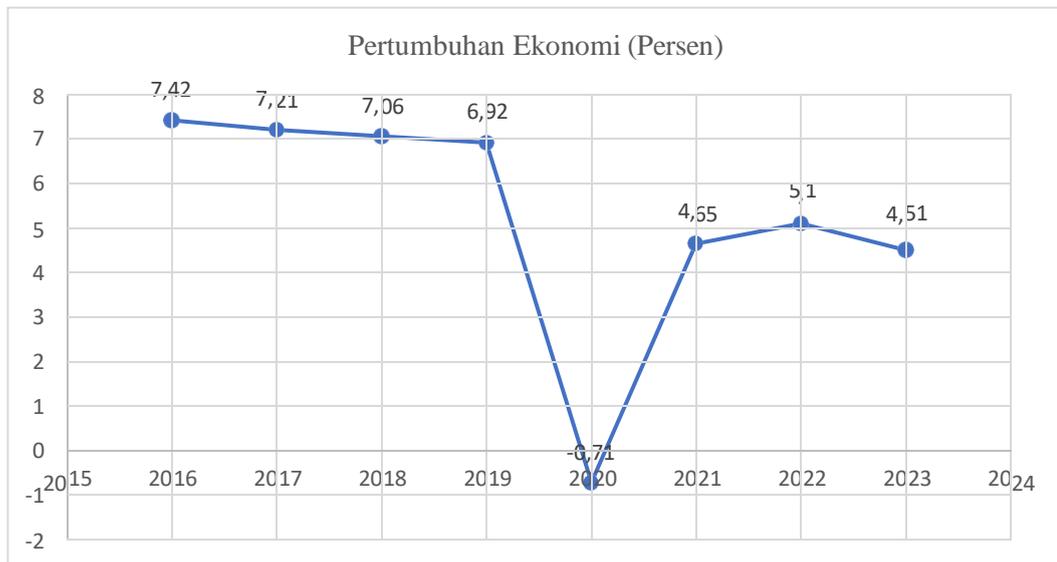
Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkat output ekonomi, serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mempercepat pemulihan ekonomi yang menurun (Samuelson dan Nordhaus,2004.)

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan oleh bank sentral, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika melihat kecenderungan, belanja pemerintah terus meningkat dari waktu ke waktu dalam berbagai sistem perekonomian di Indonesia. (Suparmoko, 2013).

Kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia ditunjukkan oleh besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan oengeluaran negara selama satu tahun anggaran

Dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah sebaiknya berasal dari sumber keuangan daerah sendiri, dengan tujuan meningkatkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kemampuan mereka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara memanfaatkan semua sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, peran dan campur tangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi

jalannya perekonomian suatu daerah sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil (Hanifah, dkk., 2017).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

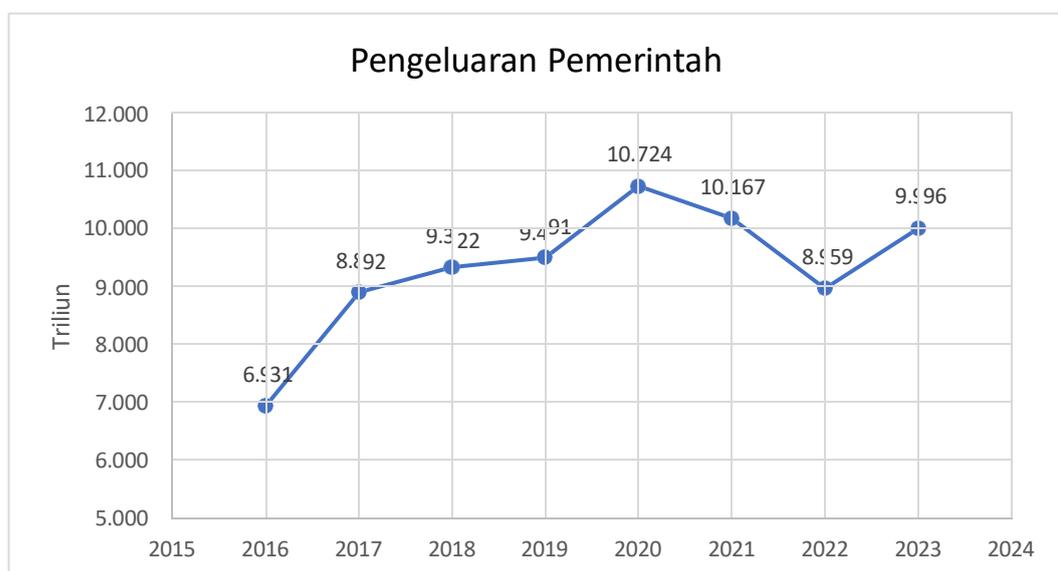
Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2023

Gambar 1.1 Menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2016, terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sebesar 7,43 persen, yang menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat. Namun, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 7,21 persen, hingga pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 6,92 persen.

Menurut Sjafrizal (2014), faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah peningkatan ekspor yang berasal dari sektor basis wilayah tersebut. Semakin tinggi aktivitas ekspor dari sektor basis, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan semakin tinggi. Ekspor yang dimaksudkan di sini melibatkan perdagangan antar wilayah di dalam negara maupun perdagangan internasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa ekspor

bukanlah satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan wilayah, seperti bantuan dari pemerintah pusat, investasi, dan tingkat produktivitas masyarakat (Tarigan, 2014). Tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi ekonomi, terutama karena dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut sangat rendah, bahkan minus sebesar -0,71 persen. Hal ini mencerminkan perlambatan ekonomi yang signifikan akibat pembatasan sosial dan gangguan dalam aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2021, terjadi pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,65 persen. Angka ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah masa-masa sulit pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sebesar 5,1 persen, menunjukkan adanya pemulihan yang berkelanjutan dan upaya pemulihan ekonomi yang berhasil.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023)

Gambar 1.2 Grafik Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2023 (dalam Triliun Rupiah)

Data di atas menunjukkan bahwa dari 6,93 triliun rupiah pada tahun 2016, angka ini naik menjadi 8,89 triliun rupiah pada tahun 2017, dan terus meningkat hingga mencapai 10,7 triliun rupiah pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi hanya 8.95 triliun, kemudian meningkat kembali menjadi 9,99 Triliun pada Tahun 2023.

Peningkatan pengeluaran yang terlihat selama periode tersebut mencerminkan adanya fokus pemerintah dalam meningkatkan investasi dan pembangunan di Sulawesi Selatan. Kenaikan tersebut dapat mencerminkan upaya untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, data ini juga memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk prioritas anggaran, kebijakan nasional, dan kondisi ekonomi global maupun lokal.

Sebaliknya, ketika presentase Belanja Daerah suatu daerah rendah, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak memiliki cukup dana untuk mengalokasikan belanja daerah karena prioritas anggaran dialihkan ke hal lain. Konsekuensinya, pelayanan publik kepada masyarakat dapat terganggu karena kurangnya infrastruktur atau aset yang memadai. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap produktivitas masyarakat dan dapat mengurangi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Selain itu, rendahnya belanja daerah juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Peningkatan belanja pemerintah merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Semakin tinggi belanja pemerintah, semakin besar kemungkinan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan belanja

pemerintah tidak selalu berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah yang terkadang tidak efektif dalam merangsang kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak menghasilkan efek multiplier yang positif dalam perekonomian daerah tersebut .

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penting untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengujian Hukum Wagner Dan Hypotesis Keynes: Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Sulawesi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah yang dapat diambil untuk penulisan proposal skripsi ini berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Teori Keynes di Sulawesi Selatan?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah sesuai dengan Hukum Wagner di Sulawesi Selatan
3. Apakah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara kausalitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Teori Keynes di Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah sesuai dengan Hukum Wagner di Sulawesi Selatan

3. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara kausalitas?

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat bagi Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dengan menguji relevansi Teori Keynes dan Hukum Wagner dalam konteks Sulawesi Selatan. Ini akan membantu memperluas pemahaman tentang aplikasi teori ekonomi terkait pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

2. Manfaat bagi Praktisi

Bagi peneliti atau akademisi di bidang ekonomi, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan diskusi tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan.

3. Manfaat bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengambil kebijakan tentang keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengarahkan kebijakan fiskal yang sesuai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas ekonomi di masa depan. Selain itu, belanja pemerintah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah menciptakan lapangan kerja dan memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat (Darwin & Hardilawati, 2018).

Selain itu, belanja pemerintah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengalokasikan dana untuk program-program sosial dan kesejahteraan, pemerintah dapat membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum miskin, penyandang disabilitas, dan lansia. Selain itu, melalui belanja pemerintah, lapangan kerja dapat diciptakan dan peluang kerja yang lebih luas dapat diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan dari belanja pemerintah adalah untuk menjaga stabilitas harga dan tingkat output, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Nasution, 2020). Dengan melakukan pengeluaran yang tepat, pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, belanja pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik ke peluang ekonomi.

Pengeluaran pemerintah juga mencerminkan strategi yang diadopsi oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian. Melalui alokasi dana yang tepat, pemerintah dapat mempengaruhi arah dan struktur perekonomian, seperti mendorong sektor-sektor yang dianggap strategis, mengembangkan industri baru, atau mendukung sektor pertanian dan pariwisata. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah menjadi instrumen kebijakan yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah memiliki peran yang penting dalam menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui belanja pemerintah yang tepat, pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan serta memainkan peran yang aktif dalam mengelola dan mengarahkan perekonomian negara.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan produksi barang dan jasa dalam suatu masyarakat meningkat. Biasanya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atau pendapatan atau Pertumbuhan Pendapatan Perkapita.

Pertumbuhan Pendapatan Perkapita sendiri memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat, memungkinkan perbandingan antar negara, menganalisis pertumbuhan ekonomi, dan mengidentifikasi kondisi ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan GDP/GNP tanpa mempertimbangkan apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih

kecil daripada pertumbuhan penduduk atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Sejak pertengahan tahun 1950-an, telah terjadi sejumlah analisis tentang pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan para ahli ekonomi klasik, sehingga teori ini dikenal sebagai teori pertumbuhan Neoklasik.

1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini merupakan kerangka pemikiran yang telah dikembangkan sejak abad ke-17 dan melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Adam Smith dan David Ricardo. Menurut teori ini, terdapat dua aspek utama dalam proses pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Adam Smith mengidentifikasi tiga unsur penting dalam pertumbuhan output total yang melibatkan proses produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan stok modal (Ichvani dan Sasana, 2019).

Pertama, sumber daya alam mencakup semua bahan baku dan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Adam Smith menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam tersebut. Kedua, sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja dan kemampuan manusia dalam memproduksi barang dan jasa.

Adam Smith menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. dan ketiga, persediaan stok modal mengacu pada akumulasi modal fisik seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Adam Smith mengemukakan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui akumulasi modal, yaitu investasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa depan.

Dalam teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan penduduk juga dianggap sebagai faktor penting. Adam Smith percaya bahwa pertumbuhan penduduk yang stabil dan seimbang dapat memberikan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi, tetapi pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat mengakibatkan tekanan pada sumber daya alam dan penurunan standar hidup.

Secara keseluruhan, teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya alam, investasi dalam sumber daya manusia, dan akumulasi modal sebagai faktor-faktor utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki sifat constant return to scale, yang berarti output akan meningkat secara proporsional jika kapital dan tenaga kerja digandakan, dan input baru memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan input yang sudah ada.

Dalam teori ini, faktor-faktor produksi yang diperhitungkan adalah kapital, tenaga kerja, dan pengetahuan, sedangkan input lainnya diasumsikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Ichvani dan Sasana, 2019). Pada model Solow ada beberapa yang mendominasi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pertama, teknologi yang eksogen, Solow mengatakan bahwa teknologi yang eksogen

adalah penentu utama untuk bertumbuh ekonomi suatu Negara dalam jangka panjang, bukan tenaga kerja dan modal. Kedua, tabungan yang eksogen, yaitu tabungan yang sudah ditetapkan dengan jumlah tertentu. Dimodel pertumbuhan solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, bagaimana pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian. Jadi semakin banyak persediaan modal yang bertumbuh, semakin banyak pertumbuhan populasi, dan ada kemajuan teknologi itu akan mempengaruhi output barang suatu Negara.

3) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini memiliki tujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang stabil atau steady growth dalam jangka panjang. Dalam analisis dua sektor, investasi harus terus meningkat agar perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan.

Harrod domar menyatakan bahwa penting yang namanya tabungan. Tabungan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Jika investasi meningkat maka, tabungan juga meningkat. Peningkatan investasi diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Jika investasi saat ini sebesar I , maka pada tahun berikutnya investasi perlu meningkat menjadi $(I + \Delta I)$ (Ichvani dan Sasana, 2019).

Tapi disisi lain ada pertumbuhan populasi, bahwa pertumbuhan populasi ini adalah tenaga kerja, semakin bertumbuh penduduk berarti semakin bertumbuh tenaga kerja, tetapi perlu dilihat tenaga kerja yang mana. Jadi ada pertumbuhan populasi. Pertumbuhan penduduk mengurangi capital. Karena setiap orang yang bertumbuh pasti butuh modal. Selanjutnya kemajuan teknologi, semuanya ini

mempengaruhi tingkat output pertumbuhan dan pertumbuhannya sepanjang waktu.

4) Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori ini menyatakan bahwa faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada modal dan tenaga kerja, tetapi juga melibatkan teknologi, kewirausahaan, bahan baku, dan material. Selain itu, kelompok teori ini juga mengakui bahwa ketersediaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional (*term of trade*) juga merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ichvani dan Sasana, 2019).

2.1.3 Hukum Wagner

Wagner's law menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada pengeluaran pemerintah (pertumbuhan ekonomi → pengeluaran pemerintah). Wagner mengemukakan pandangannya mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat relatif terhadap GNP. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan empiris yang dilakukan oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19. Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan perkapita, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan penentu utama dari peningkatan pertumbuhan relatif pengeluaran sektor publik (Sharma, *et. al*, 2022). Wagner menunjukkan bahwa teorinya didasarkan pada teori organis mengenai

pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

2.1.4 Hipotesis Keynes

Hipotesis Keynesian berbeda dengan Wagner's Law. Hipotesis Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memengaruhi aktivitas ekonomi (pengeluaran pemerintah → pertumbuhan ekonomi). Dalam pandangan John Maynard Keynes, pengeluaran pemerintah adalah bagian dari permintaan agregat.

Pada saat situasi di mana ekonomi mengalami penurunan (resesi), pemerintah dapat menggunakan pengeluaran untuk merangsang permintaan agregat. Peningkatan pengeluaran pemerintah mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat, produksi juga meningkat, dan hal ini menyebabkan peningkatan permintaan agregat, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan produk domestik bruto (PDB).

Oleh karena itu, jika pengeluaran pemerintah meningkat, dengan asumsi lainnya tetap sama, output juga meningkat (Poku, *et. al*, 2022). Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menciptakan efek pengganda, yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan output. Menurut teori Keynesian, pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen yang mempengaruhi pertumbuhan PDB. Hal ini berarti bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah. (Eldemerdash & Ahmed 2019).

Secara teoritis, teori Keynesian secara umum berpendapat bahwa intervensi pemerintah dapat meratakan fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mempengaruhi ekonomi dengan mempromosikan kesejahteraan sosial melalui implementasi program ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang tepat (Jibir & Aluthge, 2019). Oleh karena itu, pengeluaran publik dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal eksogen untuk menghasilkan pertumbuhan lebih melalui berbagai efek permintaan agregat, terutama selama masa resesi (Aluthge *et al.*, 2021). Efek pengali dari pengeluaran pemerintah biasanya memiliki dua aspek (Alshammary *et al.*, 2022).

Bagian pertama menunjukkan bahwa peningkatan ukuran pemerintah akan diimbangi oleh peningkatan pendapatan pajak jika efek pengali sama dengan satu, yang pada akhirnya cenderung menjaga keseimbangan fiskal. Bagian kedua terjadi ketika pengurangan pajak mengimbangi ekspansi pengeluaran pemerintah. Dalam situasi ini, nilai efek pengali akan lebih besar dari satu.

Oleh karena itu, jika ukuran pemerintah optimal, permintaan agregat akan tumbuh, yang cenderung meningkatkan output suatu negara. Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan PDB, dan kausalitas berjalan dari pengeluaran pemerintah ke PDB (Alshammary *et al.*, 2022). Ekonom Keynesian percaya bahwa peran pemerintah adalah untuk meratakan fluktuasi siklus bisnis (Jibir & Aluthge, 2019).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, dan sebaliknya, semakin kecil pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah (Agustina, 2019). Dengan demikian terdapat indikasi bahwa adanya hubungan positif antara

pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan agregat, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah yang lebih besar dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi dan memicu multiplier effect, di mana setiap unit peningkatan pengeluaran pemerintah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil, hal ini dapat membatasi stimulus ekonomi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Kurangnya pengeluaran pemerintah dapat mengakibatkan penurunan permintaan agregat, kurangnya investasi, dan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini mencerminkan pandangan yang umum dalam teori ekonomi bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual seperti kebijakan fiskal, kondisi ekonomi makro, struktur ekonomi regional, dan faktor-faktor lainnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh beberapa peneliti pada periode waktu yang berbeda. Bazán, et. al., (2022). Penelitian ini menganalisis hubungan antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi di Peru dari 1980 Q1 hingga 2021 Q4. Dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat kointegrasi antara PDB riil

dan pengeluaran publik, serta pengeluaran konsumsi publik dan PDB riil. Dengan menggunakan model koreksi kesalahan dan autoregressive distributed lag kemudian diperoleh hasil bahwa Hukum Wagner dan hipotesis Keynes berlaku dalam kasus Peru.

Surgawati (2020). Data yang digunakan adalah data sekunder dari 27 kabupaten/kota dalam periode 2010-2017. Metode estimasi yang digunakan adalah Two Stage Least Square dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dan struktur urban berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan total pengeluaran pemerintah juga berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia.

Pasaribu & Septriani (2020) juga dalam penelitiannya menguji Hukum Wagner versus Hipotesis Keynes untuk Indonesia menggunakan uji kausalitas Granger. Parameter jangka panjang dan uji kausalitas menunjukkan bahwa Hukum Wagner berlaku di Indonesia, bukan Hipotesis Keynes. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya efek positif dan signifikan secara statistik dalam jangka panjang yang berjalan dari pertumbuhan ekonomi menuju pengeluaran pemerintah, sesuai dengan Hukum Wagner di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan populasi juga memberikan efek positif terhadap pengeluaran pemerintah.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kutasi & Marton (2020) menggunakan metode GMM dan regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara belanja publik dan pertumbuhan PDB di 25 negara Uni Eropa. Temuan mereka menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan penduduk memiliki efek negatif terhadap PDB per kapita.

Ahuja & Pandit (2020) dengan melakukan penelitian dengan skala yang lebih besar dari penelitian sebelumnya, meneliti korelasi antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di 59 negara berkembang dengan variabel kontrol. Penelitian ini cenderung mengikuti hipotesis Keynes. Dimana, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi, dan pendapatan pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan inflasi berdampak negatif.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Poku, *et. al.*, (2022) mengkaji dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Ghana menggunakan data dari tahun 1970 hingga 2016, dengan menggunakan teknik estimasi ekonometri ARDL. Temuan empiris menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Berbeda dengan penelitian diatas, Wijayanti (2008) melakukan penelitian dengan menggunakan uji kointegrasi Engle Granger dan uji kausalitas Granger dalam kerangka VAR. Penelitian ini menyatakan bahwa tidak dapat ditemukan arah hubungan kasualitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, sehingga baik Hukum Wagner maupun hipotesis Keynes tidak valid untuk kasus Indonesia.

Mohammadi & Ram (2015) gagal menemukan bukti yang mendukung hukum Wagner di Malaysia, Filipina, Singapura & Thailand. Demikian pula, Ibrahim & Bashir (2019) menemukan bahwa hukum Wagner tidak berlaku di Sudan. Babajide *et al.* (2020) juga tidak menemukan bukti penerapannya di Nigeria.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

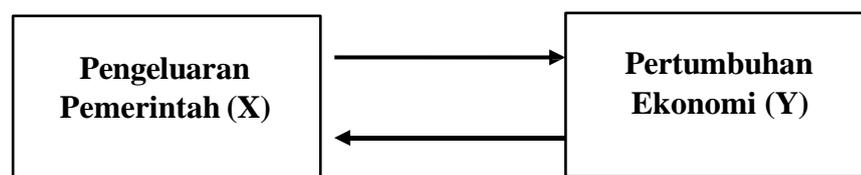
Kerangka ini adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti diuraikan dengan kajian teori diatas. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat pengaruh antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Wagner dan hipotesis Keynes adalah dua konsep yang terkait dengan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya. Hubungan antara pengeluaran sektor publik dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian selama beberapa dekade dan tetap relevan hingga saat ini. Para pembuat kebijakan dan peneliti secara terus-menerus mempelajari dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengeluaran pemerintah yang cerdas dan efisien dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang positif. Ketika pemerintah menginvestasikan dana publik dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya, hal itu dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong perkembangan sektor ekonomi.

Pengeluaran pemerintah yang tepat juga dapat memberikan stimulus bagi sektor swasta, dengan mendorong konsumsi dan investasi yang lebih tinggi. Efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, pengelolaan yang baik, dan aliran dana yang efisien ke sektor yang paling membutuhkan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang kuat juga dapat berdampak pada pengeluaran pemerintah. Ketika perekonomian tumbuh dengan baik, pemerintah akan menerima lebih banyak pendapatan dari pajak dan sumber-sumber lainnya. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur dan program sosial, yang pada gilirannya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat dirumuskan dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan sesuai dengan hipotesis Keynes.
2. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan sesuai dengan teori Wagner.